KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 163-173
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13490

STRATEGI BPMP PROVINSI PAPUA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PEMBELAJARAN MENDALAM

Candra Ike Suryani[1*], Talabudin Umkabu[2], Dyan Pratiwi[3]

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Fattahul Muluk Papua, Indonesia
Penulis korespondensi: candrasuryani08@gmail.com. talabudin.umkabu@iainfmpapua.ac.id. dyan.pratiwi@iainfmpapua.ac.id

Abstract. *Improving educational quality through deep learning requires institutional strategies that connect policy support, educator capacity, and classroom implementation. This study analyzes the strategies of the Education Quality Assurance Agency (BPMP) of Papua Province in promoting educational quality through a deep learning approach and identifies the obstacles encountered. The study employed a descriptive qualitative design and was conducted at BPMP Papua Province from April to June 2026. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Head of BPMP, the person in charge of the deep learning priority program, educational quality assurance officers (widyaprada), school representatives, and other relevant parties. Data credibility was examined through source and technique triangulation, while analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal three connected strategies: advocacy and coordination with local governments to establish shared understanding and policy commitment; technical guidance to strengthen educators' conceptual and practical competencies; and assistance, monitoring, and reflective evaluation at school level, including the development of model schools and the use of baseline information. The main barriers are misconceptions about deep learning, unequal facilities and internet access, and geographical constraints that limit program reach. The study highlights the importance of sustained, context-sensitive collaboration and equitable support for schools across Papua.*
Keywords: *Deep Learning; Education Quality; Educational Strategy; Papua; Quality Assurance.*

Abstrak. Peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pembelajaran mendalam memerlukan strategi kelembagaan yang menghubungkan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas pendidik, dan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pembelajaran mendalam serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan dilaksanakan di BPMP Provinsi Papua pada April–Juni 2026. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala BPMP, PIC pembelajaran mendalam, widyaprada, perwakilan sekolah, dan pihak terkait. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga strategi yang saling berkaitan, yaitu advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun kesamaan persepsi serta komitmen kebijakan; bimbingan teknis untuk memperkuat pemahaman konseptual dan keterampilan praktis pendidik; serta pendampingan, monitoring, dan evaluasi reflektif di satuan pendidikan melalui pengembangan sekolah model dan pemanfaatan data awal (baseline). Hambatan utama meliputi miskonsepsi tentang pembelajaran mendalam, keterbatasan sarana dan jaringan internet, serta kondisi geografis yang membatasi jangkauan program. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan dukungan yang kontekstual serta merata bagi satuan pendidikan di Papua.
Kata kunci: jaminan mutu; mutu pendidikan; Papua; pembelajaran mendalam; strategi pendidikan.

Naskah Masuk: 18 November 2026; Revisi: 19 November 2026; Diterima: 20 November 2026; Terbit: 21 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya akses untuk bersekolah, tetapi juga oleh kualitas pengalaman belajar yang diterima peserta didik. Proses pembelajaran perlu mendorong pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis dan reflektif, serta kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan situasi kehidupan nyata. Dalam konteks tersebut, pendekatan pembelajaran mendalam menjadi salah satu arah transformasi pembelajaran karena menekankan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan (Suyanto, 2025).

Urgensi peningkatan mutu pendidikan semakin nyata di Provinsi Papua. Kondisi geografis yang beragam, jarak antardaerah, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kesiapan sumber daya manusia pendidikan menghadirkan tantangan bagi pemerataan layanan dan kualitas pembelajaran. Kajian mengenai pendidikan di Papua menunjukkan bahwa kondisi wilayah dan ketersediaan sumber daya turut memengaruhi akses serta kesetaraan pendidikan (Nabila et al., 2024; Ratuanak et al., 2025; Tutukansa et al., 2022). Oleh sebab itu, transformasi pembelajaran di Papua membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian kebijakan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kapasitas satuan pendidikan.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Peran tersebut menuntut koordinasi dengan pemerintah daerah, penguatan kapasitas pendidik, dan dukungan implementasi pada tingkat sekolah. Pembelajaran mendalam tidak dapat dijalankan hanya melalui instruksi kebijakan; pemahaman yang tepat, kesiapan pendidik, sarana pendukung, serta pendampingan yang konsisten diperlukan agar prinsip pembelajaran dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembelajaran mendalam dari perspektif guru dan satuan pendidikan. Prastyo et al. (2025) mengidentifikasi adanya persepsi dan miskonsepsi guru mengenai pembelajaran mendalam, sedangkan Marsona dan Zakir (2025) serta Hasanuddin et al. (2025) membahas penerapannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Paramita et al. (2025) juga menguraikan tantangan implementasi pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka. Kajian-kajian tersebut memberi landasan penting, tetapi lebih banyak menempatkan fokus pada persepsi guru atau praktik pembelajaran di sekolah.

Ruang kajian yang masih perlu diperjelas adalah strategi kelembagaan lembaga penjaminan mutu dalam menghubungkan advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas pendidik, dan pendampingan implementasi pada konteks wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan mengkaji praktik BPMP Provinsi Papua secara empiris. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi BPMP Provinsi Papua dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pembelajaran mendalam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi kelembagaan dan mutu pendidikan

Strategi kelembagaan merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, strategi perlu diterjemahkan ke dalam program yang terencana, dilaksanakan secara konsisten, dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan lapangan. Manajemen mutu pendidikan menempatkan keterpaduan kebijakan, sumber daya, proses pembelajaran, dan evaluasi sebagai unsur yang saling memengaruhi (Rosyid, 2023; Umkabu, 2013).

Mutu pendidikan tidak cukup diukur dari keberadaan program atau kelengkapan administrasi. Mutu juga tercermin pada proses pembelajaran yang memberi ruang bagi peserta didik untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan. Karena itu, strategi BPMP perlu menjangkau level kebijakan daerah sekaligus praktik pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran mendalam

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk membangun pemahaman yang utuh dan bermakna. Prinsip berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful) menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini menuntut guru merancang pengalaman belajar yang mengaitkan konsep dengan konteks, memberi kesempatan untuk berpikir, berdiskusi, menerapkan pengetahuan, dan melakukan refleksi (Suyanto, 2025).

Pembelajaran mendalam tidak identik dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau sekadar perubahan istilah kurikulum. Temuan Prastyo et al. (2025) menunjukkan masih adanya miskonsepsi mengenai konsep tersebut. Penelitian Marsona dan Zakir (2025) serta Hasanuddin et al. (2025) memperlihatkan bahwa penerapan pendekatan ini dapat

diintegrasikan dalam perencanaan dan praktik pembelajaran, namun memerlukan kesiapan guru, waktu, dan sarana yang mendukung.

Strategi penguatan implementasi dan faktor penghambat

Penguatan implementasi pembelajaran mendalam pada tingkat kelembagaan dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan, bimbingan teknis, serta pendampingan dan monitoring. Advokasi membangun kesamaan pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan. Bimbingan teknis memperkuat pengetahuan dan keterampilan pendidik, terutama jika disertai contoh praktik dan refleksi. Pendampingan membantu sekolah menerapkan pengetahuan tersebut sesuai kondisi nyata dan memperbaiki praktik secara berkelanjutan (Putra & Rizqi, 2024; Santoso et al., 2024; Setyowati et al., 2025).

Keberhasilan strategi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pemahaman pelaksana, ketersediaan sarana-prasarana, dan aksesibilitas. Keterbatasan infrastruktur serta kondisi geografis dapat menghambat pemerataan kegiatan pengembangan kompetensi dan pendampingan (Lestari, 2025; Nabila et al., 2024). Dengan demikian, strategi peningkatan mutu perlu bersifat adaptif terhadap variasi kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memahami secara mendalam strategi kelembagaan BPMP Provinsi Papua dan dinamika pelaksanaannya dalam konteks alamiah. Penelitian dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua pada April sampai Juni 2026.

Informan penelitian meliputi Kepala BPMP Provinsi Papua, PIC Tim Prioritas 7 pembelajaran mendalam, widyaprada atau pegawai BPMP, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait yang memiliki informasi mengenai advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan implementasi. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fokus penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data pendukung diperoleh melalui dokumen program, dokumentasi kegiatan, dan arsip yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kegiatan dan kondisi pelaksanaan program, wawancara untuk menggali pengalaman serta pandangan informan, dan dokumentasi untuk memeriksa bukti tertulis maupun visual. Peneliti menjadi instrumen utama dengan bantuan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan daftar dokumentasi.

Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema strategi advokasi, bimbingan teknis, pendampingan dan monitoring, serta faktor penghambat. Hasil pengelompokan disajikan secara naratif untuk menemukan pola dan hubungan antartema, kemudian disimpulkan dengan memeriksa konsistensinya terhadap bukti yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi BPMP Provinsi Papua dalam peningkatan mutu pendidikan

Advokasi kepada pemerintah daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokasi merupakan langkah awal BPMP Provinsi Papua untuk membangun kesiapan sistem pendidikan dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Advokasi dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi kebijakan, rapat konsultasi daerah, dan pelibatan dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam wawancara, PIC Tim Prioritas 7 menjelaskan bahwa forum konsultasi daerah digunakan untuk membahas bagaimana pembelajaran mendalam dapat diimplementasikan di daerah dengan mengundang dinas pendidikan dan unsur program terkait (Sigit Utomo, wawancara, 4 Juni 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa advokasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diarahkan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan membangun komitmen lintas pemangku kepentingan. Kesamaan pemahaman menjadi penting karena perbedaan interpretasi tentang pembelajaran mendalam dapat memengaruhi kesiapan pemerintah daerah dan sekolah. Dalam perspektif konstruktivisme sosial, interaksi dan komunikasi menjadi ruang pembentukan pemahaman bersama (Tohari & Rahman, 2024). Dengan demikian, forum koordinasi yang dilakukan BPMP berfungsi sebagai sarana membangun kesepahaman sebelum program diterapkan pada satuan pendidikan.

Strategi advokasi juga menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. BPMP berperan sebagai penghubung kebijakan pusat dengan kebutuhan pemerintah daerah dan sekolah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penyelarasan

kebijakan daerah agar implementasi kurikulum dan pembelajaran dapat berjalan lebih terarah (Noviani & Nafisah, 2022).

Bimbingan teknis pembelajaran mendalam

Strategi kedua adalah pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, terutama guru dan pemangku kepentingan sekolah. Kegiatan ini diarahkan agar peserta memahami konsep, tujuan, dan prinsip pembelajaran mendalam serta mampu menerjemahkannya ke dalam rancangan pembelajaran. Materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dilengkapi diskusi, contoh praktik, dan penyusunan rancangan pembelajaran.

Pengalaman peserta memperlihatkan manfaat kegiatan tersebut. Kepala sekolah SD Muhammadiyah Abepura, Muhammad Zamroni, menyampaikan bahwa materi bimtek membantu peserta memahami konsep melalui contoh praktik, diskusi, dan penyusunan rancangan pembelajaran bersama (wawancara, 5 Juni 2026). Keterangan ini menunjukkan bahwa bimtek berfungsi sebagai ruang belajar profesional, bukan sekadar kegiatan sosialisasi satu arah.

BPMP juga mulai mengembangkan sekolah model sebagai ruang untuk memperlihatkan praktik baik implementasi pembelajaran mendalam. Sekolah model diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan pendidikan lain dan memperkuat hubungan antara pengetahuan yang diperoleh saat bimtek dengan praktik di kelas. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya penguatan kompetensi pedagogik dan pendampingan dalam penerapan pendekatan pembelajaran baru (Santoso et al., 2024; Putra & Rizqi, 2024).

Meski demikian, dampak bimtek akan lebih kuat apabila kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas perlu memberi ruang bagi guru untuk mencoba, memperoleh umpan balik, dan merefleksikan praktiknya. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi berlanjut pada perubahan proses pembelajaran.

Pendampingan dan monitoring implementasi

Strategi ketiga adalah pendampingan dan monitoring pada satuan pendidikan. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan sekolah, diskusi bersama guru, konsultasi ketika sekolah menghadapi kesulitan, serta pemberian contoh perangkat pembelajaran.

Strategi ini diarahkan untuk menjembatani kebijakan dan praktik pembelajaran serta menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

BPMP menggunakan instrumen monitoring untuk memperoleh gambaran kondisi sekolah. Kepala BPMP Provinsi Papua menjelaskan bahwa tim terlebih dahulu menyusun instrumen, kemudian mengunjungi lokasi untuk mengamati kondisi sekolah, memeriksa dokumen, dan melakukan wawancara dengan peserta didik (Junus Simangunsong, wawancara, 3 Juni 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga berupaya melihat pengalaman belajar dan praktik yang berlangsung di sekolah.

Penggunaan data awal (baseline) menjadi salah satu dasar untuk memahami kondisi sekolah sebelum pendampingan dilakukan. Selain kunjungan langsung, BPMP melaksanakan evaluasi melalui pertemuan dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk membahas capaian, hambatan, serta kebutuhan tindak lanjut. Proses evaluasi yang reflektif dan kolaboratif tersebut memungkinkan strategi pendampingan disesuaikan dengan perkembangan implementasi.

Namun, intensitas pendampingan masih menghadapi keterbatasan karena jumlah sekolah yang perlu dilayani cukup banyak. Kepala sekolah yang diwawancarai menyampaikan bahwa pendampingan melalui kunjungan, konsultasi, dan diskusi membantu sekolah, tetapi waktu pendampingan masih terbatas sehingga diharapkan dapat dilakukan lebih rutin (Muhammad Zamroni, wawancara, 5 Juni 2026). Hal ini menegaskan perlunya mekanisme pendampingan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan komunikasi digital dan penguatan komunitas belajar sekolah.

Faktor penghambat pelaksanaan strategi

Miskonsepsi tentang pembelajaran mendalam

Faktor penghambat pertama adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai pembelajaran mendalam di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Pada tahap awal implementasi, pendekatan ini terkadang dipahami sebagai kebijakan kurikulum baru atau disamakan dengan penggunaan teknologi tertentu, bukan sebagai pendekatan pedagogis yang menekankan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Miskonsepsi tersebut dapat menyebabkan tujuan dan praktik implementasi tidak dipahami secara seragam.

Temuan ini sejalan dengan Prastyo et al. (2025) yang menunjukkan adanya miskonsepsi guru dalam memahami pembelajaran mendalam. Karena itu, advokasi dan

bimtek perlu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan penjelasan konseptual yang sederhana, contoh praktik yang relevan, dan ruang diskusi. Penyamaan persepsi merupakan prasyarat agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi praktik yang sesuai.

Keterbatasan sarana dan prasarana

Faktor kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama jaringan internet, perangkat teknologi, serta fasilitas pembelajaran yang belum merata. Kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan bimtek daring maupun luring dan membatasi kemampuan sekolah untuk mengakses materi serta layanan pendampingan. Ketimpangan fasilitas juga menyebabkan kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran mendalam tidak sama.

Keterbatasan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi pembelajaran memerlukan dukungan ekosistem pendidikan. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kualitas proses tetap membutuhkan lingkungan belajar dan fasilitas yang memungkinkan guru serta peserta didik melaksanakan kegiatan secara optimal. Kajian mengenai infrastruktur pendidikan juga menekankan bahwa keterbatasan fasilitas dapat berimplikasi terhadap proses pembelajaran (Lestari, 2025).

Hambatan geografis dan aksesibilitas wilayah

Faktor ketiga adalah kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah Papua. Luas wilayah, topografi yang beragam, keterbatasan moda transportasi, serta jarak antarsatuan pendidikan menyebabkan kegiatan advokasi, bimtek, pendampingan, dan monitoring belum dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata. Kegiatan pelatihan cenderung dipusatkan di ibu kota kabupaten dan jumlah sekolah yang diundang dapat dibatasi oleh ketersediaan anggaran. Dampaknya, intensitas interaksi antara BPMP dan sekolah di wilayah yang sulit dijangkau menjadi terbatas.

Kondisi tersebut memperkuat temuan kajian mengenai pengaruh geografis terhadap akses dan kesetaraan pendidikan di wilayah Indonesia, termasuk Papua (Nabila et al., 2024; Ratuanak et al., 2025). Oleh karena itu, strategi yang adaptif diperlukan, misalnya melalui penguatan koordinasi daerah, pelatihan bertahap, pemanfaatan teknologi sesuai ketersediaan jaringan, serta pengembangan sekolah model sebagai pusat berbagi praktik baik.

Sintesis temuan

Secara keseluruhan, strategi BPMP Provinsi Papua membentuk rangkaian yang saling berhubungan. Advokasi membangun dukungan dan kesamaan persepsi pada tingkat

kebijakan; bimbingan teknis memperkuat kapasitas pendidik; sedangkan pendampingan dan monitoring mengawal penerapan serta perbaikan praktik di sekolah. Ketiga strategi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran mendalam membutuhkan kerja kelembagaan yang berkelanjutan, bukan intervensi yang berdiri sendiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan hubungan ketiga strategi tersebut dalam konteks BPMP Provinsi Papua, sekaligus menunjukkan bagaimana hambatan pemahaman, fasilitas, dan geografi memengaruhi jangkauan implementasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi BPMP Provinsi Papua dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui tiga strategi utama yang saling berkaitan, yaitu advokasi kepada pemerintah daerah, bimbingan teknis bagi pendidik dan satuan pendidikan, serta pendampingan dan monitoring implementasi. Advokasi diarahkan untuk membangun kesamaan persepsi, koordinasi, dan dukungan kebijakan. Bimbingan teknis memperkuat pemahaman dan keterampilan pendidik melalui materi, diskusi, contoh praktik, dan penyusunan rancangan pembelajaran. Pendampingan dan monitoring dilakukan melalui kunjungan sekolah, konsultasi, penggunaan instrumen dan data awal, pengembangan sekolah model, serta evaluasi reflektif.

Pelaksanaan strategi tersebut menghadapi tiga hambatan utama, yaitu miskonsepsi mengenai konsep pembelajaran mendalam, keterbatasan sarana-prasarana termasuk jaringan internet, serta kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah Papua. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap pemerataan kegiatan dan intensitas pendampingan. Dengan demikian, strategi peningkatan mutu perlu terus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan satuan pendidikan.

BPMP Provinsi Papua disarankan memperkuat advokasi secara berkelanjutan, melaksanakan bimbingan teknis secara berjenjang, serta mengembangkan pendampingan rutin dengan indikator monitoring yang jelas. Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan kebijakan, anggaran, fasilitas, dan akses internet. Satuan pendidikan perlu mengoptimalkan komunitas belajar, MGMP, supervisi akademik, dan refleksi pembelajaran. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak strategi tersebut terhadap perubahan praktik pembelajaran dan capaian belajar peserta didik pada wilayah atau jenjang pendidikan yang lebih spesifik. Penelitian ini terbatas pada satu lembaga dan periode April–Juni 2026 sehingga temuannya perlu dipahami sesuai konteks tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh informan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, para pendidik dan pihak terkait yang telah memberikan informasi serta membantu proses pengumpulan data. Artikel ini dikembangkan dari skripsi penulis pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Fattahul Muluk Papua.

DAFTAR REFERENSI

Apriliani, A. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu standar pembiayaan pendidikan Provinsi Jambi, 8, 41634–41640.

Cahyono, B. T., Sukmawati, F., Santosa, E. B., & Prihatin, R. (2025). Enhancing junior high school teaching performance through AI-supported deep learning approaches, 27(3), 1040–1053.

Hasanuddin, M. N., Rohmad, M. A., & Wachidah, H. N. (2025). Penerapan deep learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah atas negeri, 31, 263–269. https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2130

Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 1, 1–9.

Lestari, A. (2025). Keterbatasan infrastruktur dan implikasinya terhadap proses pembelajaran di SMAN 15 Muaro.

Marsona, K., & Zakir, S. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka berbasis pendekatan deep learning dalam pembelajaran PAI di SD IT Buah Hati, 9, 33579–33583.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nabila, P., Tinendung, H. F., Kurniasih, L., et al. (2024). Pengaruh kondisi geografis terhadap pendidikan dasar di Indonesia, 9(2).

Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Harva Creative.

Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan Kurikulum Merdeka, 2(2), 148–162.

Paramita, A. A. J., Ariani, K. B., Mahadewi, N. P. D., & Werang, B. R. (2025). Tantangan implementasi pembelajaran mendalam sebagai pendekatan dalam Kurikulum Merdeka, 6, 757–769.

Prastyo, Y. D., Herlinda, M., & Dos Santos. (2025). Pembelajaran mendalam sebagai strategi transformasi pendidikan: Studi persepsi dan aspirasi guru Indonesia, 5(1), 1073–1085.

Putra, L. V., & Rizqi, H. Y. (2024). Pendampingan pembuatan modul ajar berbasis deep learning untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar, 3, 55–64.

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif, 9, 13074–13086.

Ratuanak, P. E. F. T. A. M. D. (2025). Akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan selama pemberlakuan otonomi khusus, 2(2), 1067–1084.

Rosyid, M. A. (2023). Manajemen mutu pendidikan dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional dan Islam, 3, 1–21.

Santoso, T. B., Trisnani, E. E., et al. (2024). Kompetensi pedagogik guru MI dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, 2(66).

Setyowati, D., Al Farisi, S., Afryaningsih, Y., & Nikhmatul, I. (2025). Pendampingan guru dalam mendesain pembelajaran bermuatan nilai Profil Pelajar Pancasila di Yayasan Pondok Pesantren Babul Ulum, 3(4), 1028–1034.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet. 19). Bandung: Alfabeta.

Suyanto. (2025). Naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tohari, B., & Rahman, A. (2024). Konstruktivisme Lev Semonovich Vygotsky dan Jerome Bruner: Model pembelajaran aktif dalam pengembangan kemampuan kognitif anak, 4(1).

Tutukansa, A. F., Tuffahati, E. D., et al. (2022). Optimalisasi peningkatan kualitas mutu pendidikan Provinsi Papua sebagai daerah 3T, 14(2), 84–92.

Umkabu, T. (2013). Manajemen mutu pendidikan berbasis karakter. Yogyakarta: Naila Pustaka.